



Analisis Kemiskinan Propinsi Maluku dengan Distribusi Penghasilan Sebagai Variabel Mediasi (Tahun 2005-2017)

Dientje Rumerung*, Korneles Sangur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan, Universitas Pattimura, Ambon

Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indoensia

Email: ^{1,*}rumerungd@gmail.com, ²korneles.sangur97@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: rumerungd@gmail.com

Submitted: 06/11/2022; Accepted: 29/11/2022; Published: 29/11/2022

Abstrak–Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan secara langsung dan tidak langsung melalui distribusi pendapatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data runtun waktu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, tahun yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara tahun 2005 – 2017. Model analisis data yang digunakan adalah analisis jalur, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif diikuti dengan uji asumsi klasik. dan kecocokan, alat analisis yang digunakan oleh Eviews dan IBM Amos. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis jalur regresi berganda. Hasil penelitian dan pembahasan dapat menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan sebaliknya terdapat pengaruh antara kesempatan kerja terhadap distribusi pendapatan. Jadi kendati ada pertumbuhan ekonomi tetapi tidak berdampak pada distribusi pendapatan. Selanjutnya ternyata tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.. Sebaliknya terdapat pengaruh antara kesempatan kerja terhadap kemiskinan, yang artinya perubahan kesempatan kerja akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui distribusi pendapatan terhadap kemiskinan membuktikan bahwa kemiskinan di Maluku lebih bersifat kemiskinan relative. Kemiskinan yang tercipta bukan diakibatkan oleh pertumbuhan ekonommi dan kesempatan kerja yang mempengaruhi pendapatan dan akibatnya tercipta kemiskinan, melainkan lebih diakibatkan oleh keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas public yang akibat kondisi Maluku yang lebih didominasi oleh laut.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Kesempatan Kerja; Distribusi Pendapatan; Kemiskinan.

Abstract–The purpose of this paper is to determine the effect of economic growth on poverty directly and indirectly through income distribution. This study uses secondary data of time series data obtained from the Central Statistics Agency of Maluku Province, the year that was the sample in this study between 2005 - 2017. The data analysis model used is path analysis, the analysis method used is descriptive analysis followed by classical assumption tests. and goodness of fit, the analysis tools used by the Eviews and IBM Amos. Hypothesis testing uses multiple regression path analysis techniques. The results of the research and discussion show that there is no influence between economic growth on income distribution, on the contrary, there is an influence between employment opportunities and income distribution. So even though there is economic growth, it does not have an impact on income distribution. Furthermore, it turns out that there is no influence between economic growth on poverty. So the economic growth that occurs does not have an impact on reducing poverty. Conversely, there is an influence between employment opportunities and poverty, which means that changes in employment opportunities will affect the level of poverty. The lack of effect on economic growth and employment opportunities through income distribution on poverty proves that in Maluku poverty indicates that poverty in Maluku is more relative poverty. Poverty that is created is not caused by economic growth and employment opportunities that affect income and consequently creates poverty, but rather due to limited access to various public facilities due to the condition of Maluku which is more dominated by the sea.

Keywords: Economic Growth; Job Opportunities; Income Distribution; Poverty.

1. PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan yang dialami masyarakat pada suatu wilayah akhir-akhir ini telah menjadi topik yang sering dibahas dan diperdebatkan pada berbagai forum ilmiah, walaupun fenomena kemiskinan itu sendiri telah ada sejak ratusan tahun yang lalu (Hahury, et al., 2022). Kemiskinan adalah masalah yang substansial dan mendasar bagi banyak negara, sebab kemiskinan tersebut berdampak terhadap perekmbangan banyak aspek (Hill, 2021). Kemiskinan merupakan kondisi yang mengakibatkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya produktifitas bahkan dalam kondisi terburuk, kemiskinan mengakibatkan kematian. Deyshappriya, (2021) mengkategorikan kemiskinan dalam 3 tingkatan, yaitu 1) Kemiskinan ekstrim (exstreme poverty) atau kemiskinan absolut menunjukkan kondisi rumah tangga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia, atau dengan kata lain kemiskinan ekstrim bukan hanya tergantung dari pendapatan saja tetapi juga karena ketersediaan jasa. 2) Kemiskinan moderat (moderate poverty) umumnya menunjukkan kondisi hidup di mana kebutuhan dasar sudah terpenuhi, namun masih relatif sederhana, karena umumnya hanya memiliki pendapatan antara US\$ 1-2 per hari. 3) Kemiskinan relatif (relative poverty) umumnya ditemukan untuk rumah tangga dengan pendapatan di bawah proporsi rata-rata pendapatan nasional

Pertumbuhan ekonomi merupakan adalah indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional (Sun et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi sejatinya merupakan proses yang berujung pada peningkatan kemakmuran rakyat, salah satunya adalah pengurangan angka kemiskinan (Afandi1 & Dwi Wahyuni2, 2017). Keberadaan penduduk miskin tersebar di seluruh pelosok Indonesia, bahkan semakin menuju ke arah timur Indonesia, jumlah penduduk miskin semakin bertambah, profil kemiskinan di Indonesia pada September 2018 yang



di terbitkan oleh BPS mencatat persentasi penduduk miskin di Provinsi Maluku sebesar 17,85%, menjadikan Provinsi Maluku berada pada urutan ke 4 provinsi termiskin di Indonesia setelah NTT diurutan ke 3. Namun demikian secara nasional persentasi penduduk miskin turun menjajdi 9,66%. Penurunan persentasi penduduk miskin juga terjadi di Provinsi Maluku. Berikut ini disajikan data kemiskinan Provinsi Maluku.

Tabel 1. Kemiskinan Di Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentasi Kemiskinan
2014	1,657,409	361.022	316.11	18.44
2015	1,686,469	399.632	328.41	19.51
2016	1,715,548	414.302	327.72	19.18
2017	1,744,654	436.865	320.51	18.45
2018	1,773,776	456.457	320.08	18.12

Data kemiskinan Provinsi Maluku dari tahun 2014 – 2018 menunjukan peningkatan jumlah penduduk, angka Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin terus meningkat, namun persentasi kemiskinan mengalami perubahan yang fluktuatif dalam dua tahun terakhir persentasi mulai menunjukan penurunan. Peningkatan jumlah penduduk miskin terindikasi dari peningkatan jumlah penduduk provinsi dan Peningkatan garis kemiskinan ini dikarenakan peningkatan harga pada setiap komoditas baik makan dan non makan yang merupakan unsur-unsur di dalam perhitungan Garis kemiskinan.

Akhir tahun 1990-an, ternyata pertumbuhan yang pro-kemiskinan atau Pro-poverty Growth (PPG) menjadi terkenal saat banyak ekonom mulai menganalisis paket-paket kebijakan yang dapat mencapai penurunan kemiskinan yang lebih cepat lewat pertumbuhan ekonomi dan perubahan distribusi pendapatan. memberikan dua pendekatan, pertama menfokuskan pada keyakinan bahwa orang-orang miskin pasti mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi walaupun tidak proposional. Artinya, pangsa pendapatan dari kelompok miskin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua fokus pada percepatan laju pertumbuhan pendapatan dari kelompok miskin lewat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan dengan memperbesar kesempatan-kesempatan bagi orang-orang miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan (Wardhana, 2016). Pertumbuhan ekonomi sejatinya merupakan proses yang berujung pada peningkatan kemakmuran rakyat, salah satunya adalah pengurangan angka kemiskinan (Mansi et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi memiliki efek progresif sederhana pada distribusi pendapatan rumah tangga terlepas dari pengeluaran sosial, rasio pajak langsung dan tidak langsung, distribusi pendidikan, dan indeks upah minimum (dikalikan dengan persen dari total lapangan kerja di sektor formal) memiliki efek yang lebih kuat (Sinding, 2009).

Penciptaan lapangan pekerjaan merupakan upaya pemerintahan rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya yang sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Manh et al., (2014) menunjukkan bahwa ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Adanya hubungan jangka pendek antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dengan faktor kelambanan, artinya pertumbuhan ekonomi sekarang akan mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja tahun mendatang. Perluasan kesempatan kerja juga merupakan dimensi ekonomis ketenagakerjaan, karena melalui kesempatan kerja pertumbuhan ekonomi diciptakan sekaligus memberikan penghasilan dan meningkatkan daya beli masyarakat (Hjazeen et al., 2021). Daya beli masyarakat berkaitan erat dengan seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan harus memperhatikan distribusi pendapatan yang merata. Masalah kemiskinan sangat mengganggu jalannya roda perekonomian dalam mencapai cita-cita bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya, dan untuk menanggulangnya perekonomian memiliki instrumennya sendiri yakni menggunakan variabel-variabel perekonomian seperti yang telah di paparkan pada latar belakang diatas.

Penelitian ini mencoba menganalisis dan mengkaji dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan yang selanjutnya juga akan berdampak terdapa kemiskinan. Langkah analisis selanjutnya adalah menganalisis apakah akibat pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap kesempatan kerja sehingga akan berdampak pula terhadap kemiskinan sesuai keadaan Propinsi Maluku.

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Apakah tedapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap distribusi pendapatan secara individu ?, 2) Apakah tedapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan secara langsung dan individu?, 3) Apakah tedapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan secara individu melalui distribusi pendapatan?

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel. Peneliti menguji hipotesisi menggunakan model analisis jalur dengan tipe recursif, metode regresi berganda dan metode korelasi. Data dalam penelitian ini menggunakan data PDRB, data lapangan pekerjaan, data rasio gini dan data kemiskinan Provinsi Maluku. Penelitian ini memiliki 4 variabel, yakni 2 variabel *exogenous*, dan 2 *endogenous* yang mana salah satu variabelnya merupakan variabel perantara *endogenous*. Adapun variabel-variabel tersebut ialah:



- 1) Variabel *Exogenous*: dalam suatu model analisis jalur ialah semua variabel-variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju ke arahnya. Jika variabel *exogenous* dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah kepala dua yang menghubungkan variabel-variabel tersebut (Sunyoto, 2013). Variabel ekonomi yang ditentukan menjadi variabel *exogenous* dalam penelitian ini yakni: *Pertumbuhan Ekonomi* (X_1) dan *Kesempatan Kerja* (X_2).
- 2) Variabel *Endogenous*: variabel yang mempunyai anak-anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Variabel yang termasuk didalamnya semua variabel perantara dan tergantung (Sunyoto, 2013). Variabel ekonomi yang ditentukan menjadi variabel *endogenous* dalam penelitian ini yakni: Variabel Perantara : *Distribusi Pendapatan* (Y_1); Variabel Tergantung: *Kemiskinan* (Y_2).

Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan nilai PDB berdasarkan harga konstan, sebab bila menggunakan harga konstan pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total *output* barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan. Adapun rumusan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

- a. Waktu pertumbuhan hanya satu periode:

$$G_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

G_t = pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)
 $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto Rill periode t (berdasarkan harga konstan)
 $PDRB_{t-1}$ = PDRB satu periode sebelumnya.

- b. Jika interval waktunya lebih dari satu periode, penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan persamaan eksponensial:

$$PDRB_t = PDRB_0(1 + r)^t \quad (2)$$

Keterangan:

$PDRB_t$ = PDRB periode t
 $PDRB_0$ = PDRB periode awal
 r = tingkat pertumbuhan
 t = jarak periode

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Formula yang digunakan untuk menghitung produktivitas tenaga kerja pada setiap sektor dilakukan dengan membandingkan PDRB sektor pertanian terhadap jumlah tenaga kerja di setiap sektor (Sofyan, dkk, 2015) yaitu:

$$P = \frac{PDRB}{JTK} \quad (3)$$

Keterangan:

P : Produktivitas
 $PDRB$: PDRB sektor
 JTK : Jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian.

Kesempatan kerja yang merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja menggambarkan penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja (Mauliadiani et al., 2019). Sementara, kesempatan kerja adalah jumlah yang menunjukkan berapa orang yang telah atau dapat tertampung dalam suatu perusahaan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja, semakin tinggi TKK maka kesempatan kerja semakin tinggi. Konsep Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) ialah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Rumus Tingkat Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut (<https://sirusa.bps.go.id/>):

$$TKK = \frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\% \quad (4)$$

Keterkaitan antara produksi barang dan permintaan tenaga kerja untuk membuat barang-barang itu, akan didapati wawasan tentang penentuan upah ekuilibrium, faktor-faktor produksi input yang digunakan untuk



menghasilkan barang dan jasa. Bila upah riil turun, produsen akan mau menambah tenaga kerja yang digunakan. Jika harga jual naik, produsen mau meningkatkan produksinya, yang berarti meningkatkan permintaan tenaga kerja sehingga permintaan terhadap tenaga kerja berhubungan terbalik dengan tingkat upah riil (Djirimu, 2021; Tridiana & Widyawati, 2019).

Pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan meningkat tidak akan memiliki arti apa pun jika distribusi pendapatan yang terjadi sangat timpang. Mengukur pembagian pendapatan nasional/daerah merupakan hal yang penting untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi dimasyarakat, namun jauh lebih penting untuk mengetahui penyebab terjadinya nilai distribusi pendapatan yang mengidentifikasi terjadinya ketimpangan. Salah satu faktor yang membuat nilai koefisien ketimpangan yang tinggi disebabkan oleh pola pembangunan ekonomi lebih bersifat sektoral, dimana sektor industri dan pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, komunikasi dan angkutan, keuangan serta jasa-jasa diutamakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang memilih pusat lokasi di daerah-daerah tertentu yang menguntungkan (Suhartono, 2011).

Adelman & Morris (1973) mengemukakan delapan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara sedang berkembang, yaitu: 1) Pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita. 2) Inflasi di mana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertumbuhan produksi barang-barang. 3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga presentase pendapatan modal lebih besar daripada persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga angka pengangguran pun bertambah. 5) Rendahnya mobilitas sosial. 6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang hasil industri guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. 7) Memburuknya nilai tukar bagi Negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai akibat adanya ketidakelastisan permintaan terhadap barang-barang ekspor Negara sedang berkembang. 8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Terdapat dua indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan (Damanik, 2018), yakni:

a. Nilai Koefisien Gini

Rasio gini merupakan salah satu ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh.

Tabel 2. Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 – 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
> 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

b. Ukuran Bank Dunia

Tabel 3. Ukuran Ketimpangan

Distribusi Pendapatans	Tingkat Ketimpangan
Kelompok 40% penduduk termiskin pengeluaran < 12% dari keseluruhan pengeluaran	Tinggi
Kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya antara 12%-17% dari seluruh pengeluaran	Sedang
Kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran	Rendah

Arsyad (2016) menegaskan penggunaan ukuran Bank Dunia yang menggambarkan semakin besar ketipangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Arsyad, 2016). Indikator distribusi pendapatan yang berkaitan erat dengan ukuran koefisien gini yakni Kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima, semakin jauh kurva tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), maka semakin tinggi pula derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Sementara untuk memperoleh koefisien Gini dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh hujur sangkar di mana kurva Lorenz tersebut berada. Ada dua macam kemiskinan yang paling umum digunakan Arsyad (2016), yaitu:

- Kemiskinan Absolut; Konsep kemiskinan seringkali dikaitkan dengan perkiraan atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat kebutuhan biasanya hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Kemiskinan dapat pula kita ukur dengan



memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut.

- b. Kemiskinan Relatif; Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti orang tersebut “tidak miskin.” Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan. Konsep inilah yang kemudian kita kenal sebagai konsep kemiskinan relatif.

Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada, Tambunan (2003) menjabarkan 8 indikator kemiskinan yakni: Pendapatan/Konsumsi per Minggu/Bulan/Tahun; Kepemilikan asset; Total Kekayaan yang dimiliki seseorang; Makanan yang dikonsumsi; Keadaan tempat tinggal; Pendidikan Fomal yang dikecap; Infra struktur dasar rumah tangga; Kesehatan. Badan Pusat Statistik menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan pendekatan *headcount indeks*. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non-makanan (Kuncoro, 2010).

Indikator yang bersifat kuantitatif dikemukakan (Adriwina, 2019), Ada tiga indikator kemiskinan yang digunakan berdasarkan kebutuhan dasar yaitu:

- a. *Head Count Index* (HCI- P_0) yang memebrikan persentasi penduduk miskin yang berada di bawah GK
- b. Indeks kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severty Indes*- P_2) adalah gambaran tentang penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Persamaan (Fosterm, J., J.Greer, dan E. Thorbecke: 1984):

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^g \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha} \quad (5)$$

Keterangan:

Z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang berada di bawah garis kemiskinan

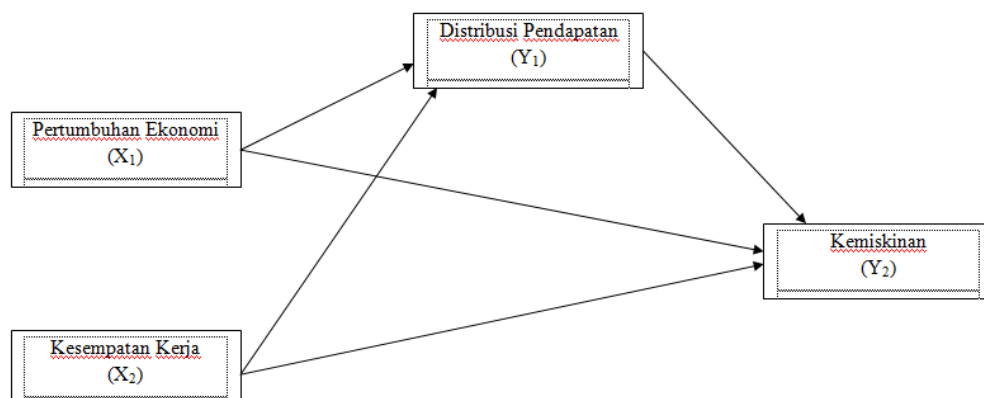
q = jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan

A = 0, *head count index*, % penduduk miskin

α = 1, *poverty gap* (indeks kedalaman kemiskinan), deficit penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

α = 2, *poverty severity index* (indeks keparahan kemiskinan)

Berlandaskan penjelasan sebagaimana dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran yang dikemukakan dalam bahasan ini selanjutnya adalah sebagaimana terlahat pada grafik berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Deskriptif

Data Laju Pertumbuhan Ekonomi; Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan perekonomian pada suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku yang ditunjukkan pada gambar diatas menunjukkan data



pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005-2017, pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai dalam rentang tahun tersebut terjadi pada tahun 2012 dengan laju pertumbuhan mencapai 7,16%, dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2008 mencapai 5,03%. Secara umum walaupun terjadi fluktuasi dengan rata-rata 5,88%, laju pertumbuhan ekonomi telah mengalami kenaikan dari tahun awal dengan tahun akhir pada tahun yang dijadikan sampel, dimana pada tahun awal 2005 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,32% dan tahun akhir 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82%, hal ini menunjukkan telah terjadi kenaikan mencapai 0,5%.

Tingkat Kesempatan Kerja; Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja, semakin tinggi TKK maka kesempatan kerja semakin tinggi (<https://maluku.bps.go.id>). Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Maluku dari tahun 2005-2017, pada 6 tahun awal terjadi kenaikan tingkat kesempatan kerja hingga mencapai puncak pada tahun 2011 mencapai 92,62% setelah itu mengalami fluktuasi, walaupun demikian secara keseluruhan tingkat kesempatan kerja terus mengalami kenaikan dengan rata-rata 89,67%. Tingkat kesempatan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2016 mencapai 92,95% dan terendah di tahun 2005 mencapai 84,99%.

Rasio Gini; Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi RT dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan alat ukur/indikator yang umum digunakan adalah koefisien Gini yang nilainya antara 0 (tidak ada kesenjangan) dan 1 (kesenjangan penuh) (Tambunan, 2003). Rasio gini Provinsi Maluku dari tahun 2005-2017 berkisar diantara 0,2-0,4, kondisi perkembangan rasio gini provinsi Maluku menurut Rofik (2014) masih berada pada tingkat ketimpangan rendah. Walaupun demikian secara keseluruhan rasio gini terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 0,34%, tahun awal sampel yakni tahun 2005 rasio gini hanya mencapai 0,26%, terus mengalami peningkatan hingga mencapai puncak tertinggi pada tahun 2011 yakni 0,41%, dan pada tahun akhir sample yakni 2017 masih berada pada 0,34%.

Persentasi Kemiskinan; Headcount Index (HCI-P0) yaitu persentasi penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Persentasi penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi (<https://www.bps.go.id/>). Secara umum terjadi perkembangan yang menurun pada kemiskinan di Propinsi Maluku. Perubahan persentasi kemiskinan dari tahun 2005-2017, pada pertengahan rentang tahun tersebut terjadi penurunan yang sangat curam yakni pada tahun 2006-2014. Secara umum persentasi kemiskinan mengalami penurunan dengan rata-rata 24,34%. Persentasi kemiskinan tertinggi berada pada tahun awal yakni 2005 mencapai 32,28% dan persentasi terendah berada pada tahun 2014 dengan capaian 18,44%. Pada tahun awal persentasi kemiskinan mencapai 32,28% dan pada tahun akhir telah turun mencapai 18,45%, artinya persentasi telah mengalami penurunan sebesar 13,83%.

3.1.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja Terhadap Distribusi Pendapatan

- Interprestasi Persamaan Model Satu Jalur*; Hasil uji regresi dengan menggunakan nilai standardize untuk variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel kesempatan kerja terhadap distribusi pendapatan, disajikan pada persamaan berikut:

$$\ln Y_1 = 0,224 \ln X_1 + 3,418 \ln X_2 + 0,3\%$$

Persamaan diatas menunjukan pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dengan variabel distribusi pendapatan, dapat diartikan bahwa kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1% searah dengan kenaikan rerata tingkat distribusi pendapatan sebesar 0.224%. Variabel kesempatan kerja berhubungan positif dengan variabel distribusi pendapatan, dapat diartikan bahwa jika terjadi kenaikan pada tingkat kesempatan kerja sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan rerata tingkat distribusi pendapatan sebesar 3,418%.

- Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)*; Nilai Adjusted R Square sebesar 0.767, dapat diartikan variabel eksogen pada persamaan yakni variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel kesempatan kerja dapat menjelaskan variabel terikat yakni variabel distribusi pendapatan sebesar 76,7%, sisanya 23,3% dijelaskan oleh variabel diluar model.
- Uji Signifikansi*; Nilai Critical Ratio variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1,638, dengan probabilitas 0,101 dan nilai Critical Ratio variabel kesempatan kerja sebesar 6,067 dengan probabilitas 0,000. Variabel pertumbuhan ekonomi didalam model memiliki Critical Ratio $\leq 1,96$ dan probabilitas $> 0,05$ sehingga keputusan terima H_0 , dapat diartikan tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap variabel endogen, sementara variabel kesempatan kerja memiliki Critical Ratio $\geq 1,96$ dan probabilitas $0,000 < 0,05$ sehingga keputusan tolak H_0 , dapat diartikan memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel endogen.

3.1.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja Dan Disatribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan

- Interprestasi Persamaan Model Dua Jalur*; Hasil uji regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel kesempatan kerja terhadap kemiskinan dapat disajikan kedalam persamaan sebagai berikut:

$$\ln Y_2 = 0,088 \ln X_1 - 4,301 \ln X_2 - 0,562 \ln Y_1 + 1,9\%$$



Persamaan diatas menunjukan variabel pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dengan variabel kemiskinan, dapat diartikan bahwa kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1% searah dengan tingkat kemiskinan yang mengalami kenaikan rerata sebesar 0.088%. Variabel kesempatan kerja berhubungan negatif dengan variabel kemiskinan, dapat diartikan bahwa jika terjadi kenaikan pada tingkat kesempatan kerja sebesar 1% mengakibatkan penurunan rerata tingkat kemiskinan sebesar 4,301%. Variabel distribusi pendapatan berhubungan negative dengan variabel kemiskinan, dapat diartikan bahwa kenaikan pada variabel distribusi pendapatan sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,562%.

- b. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square); Nilai Adjusted R Square sebesar 0.589, dapat diartikan variabel exsogen pada persamaan yakni variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel kesempatan kerja dapat menjelaskan variabel terikat yakni variabel kemiskinan sebesar 58,9%, sisanya 41,1% dijelaskan oleh variabel diluar model.
- c. Uji Signifikansi; Uji signifikan dalam persamaan 4.2 menunjukkan nilai critical ratio variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $0,214 \leq 1,96$ dengan probabilitas $0,830 > 0,05$ sehingga keputusan terima H_0 , dapat diartikan variabel pertumbuhan ekonomi tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap variabel kemiskinan. Nilai critical ratio variabel kesempatan kerja sebesar $-1,401 \leq 1,96$ dengan probabilitas $0,161 > 0,05$ sehingga keputusan terima H_0 , dapat diartikan tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel kesempatan kerja dengan kemiskinan. Danna nilai critical ratio variabel distribusi pendapatan sebesar $-0,720 \leq 1,96$ dengan probabilitas $0,471 > 0,05$ sehingga keputusan terima H_0 , dapat diartikan tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel distribusi pendapatan terhadap kemiskinan.

3.1.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja Melalui Disatribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan

- a. Uji Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total; Pengaruh tidak langsung antara variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y_2) melalui variabel perantara (Y_1)
 1. Pengaruh tidak langsung antara variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Variabel Kemiskinan melalui Variabel Distribusi Pendapatan (X_1 - Y_1 - Y_2) ditunjukan oleh nilai standardised sebagai berikut: Total effect :-0,038; Direct effect : 0,088; Indirect effect : -0,126.
 2. Pengaruh tidak langsung antara variabel Kesempatan Kerja terhadap Variabel Kemiskinan melalui Variabel Distribusi Pendapatan (X_2 - Y_1 - Y_2) ditunjukan oleh nilai standardised sebagai berikut: Total effect :-6,221; Direct effect: -4,301; Indirect effect : -1,920.
- c. Uji Signifikan
Uji Pengaruh tidak langsung dalam analisis ini memanfaatkan uji Sobel yang hasilnya terlihat pada tabel berikut ini,

Tabel 6. Uji Sobel

Variabel	Koefisien (a)	Koefisien (b)	Standar Error Variabel (SE_a)	Standar Error Variabel (SE_b)	Sobel Test
X_1 - Y_1 - Y_2	0,224	-0,562	0,137	0,780	-0,659
X_2 - Y_1 - Y_2	3,418		0,563		-0,715

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan pengaruh tidak langsung menggunakan sobel tes untuk kedua jalur variabel bebas X_1 dan X_2 terhadap Y_2 melalui Y_1 menunjukkan nilai $< 1,96$ sehingga tidak terdapat pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap kemiskinan melalui distribusi pendapatan..

3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Terhadap Distribusi Pendapatan

3.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi ialah ukuran yang menunjukkan suatu proses perubahan perekonomian dari nilai output produksi dalam suatu perekonomian dari tahun ke tahun. Perubahan output mengindikasikan perubahan pendapatan yang dihasilkan oleh setiap faktor produksi, baik itu pemilik modal dan pemilik SDA maupun SDM atau para pekerja. Nilai PDB untuk menghitung pertumbuhan salah satunya ialah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. Fokus pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini yakni melihat pendapatan penduduk dari mana pendapatan itu berasal.

Distribusi Pendapatan berkonsep pada pemerataan pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk atas kepemilikan dan atau pemanfaatan faktor produksi. Pemerataan pendapatan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara persentasi penghasilan tenaga kerja atau upah dengan pesentasi total dari pendapatan faktor produksi lain yang berwujud sewa, bunga dan laba. Kedua variabel yang dijabarkan diatas memiliki titik temu pada bahasan mengenai pendapatan penduduk. Walaupun demikian variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi variabel distribusi pendapatan, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dapat merubah pendapatan penduduk, dari sisi permintaan agregat pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung diakibatkan oleh konsumsi sektor rumah tangga



sebagai dampak dari stimulus berupa bantuan dan subsidi dari sektor pemerintah untuk meningkatkan daya beli penduduk, namun demikian stimulus tersebut tidak nyata memperbesar penerimaan penduduk secara berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak berkualitas bagi pendapatan penduduk dalam jangka panjang. Konsumsi sektor perusahaan lah yang sangat mempengaruhi dimensi pendapatan penduduk dari variabel distribusi pendapatan, konsumsi perusahaan akan sangat berkaitan dengan faktor produksi dan balas jasanya (upah, sewa, bunga dan laba).

Penelitian menunjukkan data pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012. Ditunjang oleh Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Triwulan IV Tahun 2012 yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan masih didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang pada triwulan laporan masing-masing tumbuh sebesar 5,13% (y.o.y) dan 9,39 (y.o.y), investasi terus meningkat seiring dengan pelaksanaan berbagai proyek pemerintah dan swasta. namun dari interaksi perdagangan dengan daerah luar, Maluku masih mengalami deficit neraca perdagangan (www.bi.go.id). Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada Provinsi Jambi yang membuktikan Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo Provinsi Jambi positif dan tidak signifikan (Indris, Kamal, 2014).

3.2.2 Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Distribusi Pendapatan

Kesempatan kerja ialah ukuran penyerapan tenaga kerja kedalam lapangan pekerjaan yang tersedia atau dapat pula disebut perbandingan antara tenaga kerja yang telah bekerja dengan tenaga kerja yang belum bekerja. Data tingkat kesempatan kerja menunjukkan terjadi peningkatan kesempatan kerja, bahkan mencapai 92,95% pada tahun 2016 dengan rata-rata kenaikan kesempatan kerja dari tahun 2005-2017 sebesar 89,67%. Data ini menunjukkan tingginya angkatan kerja yang telah bekerja. Walaupun demikian kenyataan dalam penelitian ini memberikan kita informasi bawah kesempatan kerja menyumbang peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. BPS pada publikasi indikator kesejahteraan rakyat Provinsi Maluku dari tahun 2011-2017 menunjukkan data tenaga kerja terbesar berada pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan dengan rata-rata persentasi sebesar 45,78%. Untuk status pekerjaan utama BPS mencatat angkatan kerja yang bekerja didominasi oleh buruh/karyawan dengan rata-rata 29,76% dan berusaha sendiri dengan persentasi 25,78% (www.bps.go.id).

Tingginya nilai koefisien ketimpangan yang tinggi disebabkan oleh pola pembangunan ekonomi lebih bersifat sektoral, dimana sektor industri dan pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, komunikasi dan angkutan, keuangan serta jasa-jasa diutamakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Padahal banyak sektor-sektor tersebut yang dikembangkan secara ekonomi akan memilih pusat lokasi di daerah-daerah tertentu yang menguntungkan. Lokasi yang dipilih umumnya daerah yang sudah mempunyai berbagai prasarana dan fasilitas penunjang pengembangan sektor tersebut. Jadi daerah yang secara historis sudah berkembang menjadi semakin berkembang, sementara daerah yang belum berkembang ekonominya sangat sulit mengejar daerah yang sudah berkembang (Indris, Kamal, 2014).

Tingkat kesempatan kerja yang tinggi seharusnya meningkatkan penerimaan yang diterima oleh penduduk, namun dalam penelitian ini kondisi kesempatan kerja yang tinggi justru memberikan kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 3,418%, nilai ini mengindikasikan telah terjadi ketimpangan distribusi pendapatan untuk setiap sektor dan status pekerjaan. Berdasarkan data BPS diatas terdapat banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh, industri-industri kerajinan rakyat serta tenaga kerja masih bertumpuh pada sektor primer seperti sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan. Diduga walaupun terjadi kenaikan pada tingkat kesempatan kerja tetapi jumlah upah yang diterima tidak sebanding dengan yang bekerja pada sektor lain, terutama sektor dan status pekerja yang didominasi oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terbilang stabil dan terus meningkat di tiap tahun, dibandingkan dengan buruh dan petani yang menerima upah tidak tetap dibawah upah minimum provinsi dan hampir tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain ketimpangan antar sektor, ketimpangan juga dapat terjadi diantara pemilik modal dengan pekerja didalam sektor yang sama, dikarenakan keuntungan yang besar akibat rendahnya upah yang dibayarkan.

Penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lewis yakni transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan lapangan kerja timbul karena perluasan (ekspansi) output yang dihasilkan dari sektor modern. Laju perluasan yang terjadi akan ditentukan oleh tingkat investasi industri dan akumulasi modal di sektor modern. Investasi ini dimungkinkan karena jumlah keuntungan atau laba sektor modern melebihi jumlah upah, dengan asumsi bahwa para pemilik modal (kapitalis) menginvestasikan kembali semua keuntungan mereka. Akhirnya, Lewis mengasumsikan bahwa tingkat upah dalam sektor industri modern tidak berubah (konstan), yang ditentukan sebagai jumlah bayaran tertentu di atas rata-rata tingkat upah subsisten yang tetap di sektor pertanian tradisional.

Penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdulah (2013) tentang variabel upah dengan koefisien determinasi α^2 0,0758 secara spesifik menyatakan bahwa pada kondisi ceteris paribus, jika upah meningkat 1 persen, maka angka index gini secara signifikan akan naik 0,0758 persen. Kondisi ini sesuai dengan data riil di lapangan. UMR setiap kabupaten/kota juga meningkat dari 2002 hingga 2011.

3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan

3.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan



Kemiskinan ialah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa kebutuhan akan makanan dan minuman maupun kebutuhan non makanan dan minuman sehingga membuat orang tersebut hidup dalam kondisi yang lebih buruk dari pada orang lain yang telah memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan ini hanya dapat dilakukan jika orang tersebut memiliki pendapatan atau uang yang cukup. Fokus utama variabel kemiskinan ialah pengolongan penduduk berdasarkan jumlah uang yang di belanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan pada nilai output produksi dalam perekonomian. nilai akan output dalam suatu perekonomian berbeda untuk setiap tahunnya hal ini dikarenakan perubahan harga-harga faktor produksi. Angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan PDB berdasarkan harga konstan. Sebab, dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan.

Penjelasan tentang variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan diatas merujuk pada nilai uang yang dihasilkan penduduk melalui faktor produksi yang dimiliki dan yang akan digunakan oleh penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup, hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan tingkat persentasi kemiskinan. Ketika kenaikan pada pertumbuhan ekonomi, saat yang sama terjadi penurunan persentasi penduduk miskin, secara sekilas hal ini terlihat berkaitan, namun variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi penurunan variabel kemiskinan tersebut ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi $>0,05$, ketidaksignifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan mengindikasikan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga penurunan kemiskinan terjadi akibat dari variabel lain. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh produktivitas penduduk tidak memberikan dampak pada kenaikan upah, sehingga daya beli penduduk tidak berubah dengan kenaikan output yang dihasilkan mereka. Dilain sisi pertumbuhan ekonomi dari investasi justru memberikan dampak yang positif bagi pra pemilik modal. Keuntungan yang besar membuat pemilik modal semakin bersemangat mengejar kenaikan output. Keadaan ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi tidak pro kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat memberikan peningkatan daya beli penduduk yang tinggi pula, sehingga upah yang diterima hanya cukup untuk mempertahankan kehidupan para penduduk dan tidak benar-benar mengeluarkan penduduk tersebut dari jurang kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya untuk mengejar target ekonomi tanpa memberikan dampak besar bagi penduduk.

Penelitian ini sejalan dengan teori menurut Marx, kemampuan para pengusaha untuk melakukan akumulasi modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakan. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah merupakan jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. Artinya upah akan sama dengan nilai sarana kehidupan yang diperlukan seorang buruh untuk mempertahankan kehidupannya. Pada kenyataannya nilai upah yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan produktivitas buruh tersebut dalam suatu proses produksi. Selisih antara nilai produktivitas buruh dengan nilai tenaga buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah inilah yang kemudian disebut nilai lebih. Nilai lebih merupakan keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha. Karena tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha adalah fungsi dari nilai lebih, maka untuk memaksimalkan keuntungan para pengusaha tidak akan segan-segan mengeksploitasi pekerja (SILALAH, 2013). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mustamin, (2013) menunjukkan bahwa secara statistik variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai efek langsung terhadap kemiskinan sebesar 0,306. Hal ini berarti setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diikuti peningkatan kemiskinan sebesar 0,306 persen dengan tingkat signifikansi 0,131. Hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dan positif mempengaruhi kemiskinan.

3.3.2 Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan

Kesempatan kerja merupakan hal yang esensial dalam setiap strategi pembangunan yang berfokus kepada pengentasan kemiskinan. Menurut Tambunan (2003) ada dua faktor penyebab langsung kemiskinan, yaitu, (i) kurang, hilang atau tidak adanya kesempatan kerja, dan (ii) rendah upah / pendapatan riil. Faktor pertama menyebabkan seseorang tidak memiliki sumber pendapatan karena tidak bekerja. Faktor kedua menyebabkan seseorang pekerja memiliki pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhan minimum sehari-hari, atau upah per harinya lebih rendah dari garis kemiskinan yang berlaku.

Data tingkat kesempatan kerja menunjukkan rata-rata persentasi angkatan kerja yang bekerja mencapai rata 89,67% berbanding terbalik dengan rata-rata tingkat persentasi kemiskinan mencapai 24,34%. Hasil dalam penelitian ini memberikan gambaran yang berbeda, dimana kesempatan kerja tidak memberikan dampak terhadap kemiskinan, baik secara negative yakni menyumbang tingginya angka kemiskinan seperti yang dikemukakan oleh Tambunan (2018), maupun dampak positif yakni pengurangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan peningkatan dalam tingkat kesempatan kerja mengindikasikan kemampuan lapangan pekerjaan yang tersedia di Provinsi Maluku untuk menyerap angkatan kerja, semakin banyak angkatan kerja yang bekerja maka semakin banyak penduduk yang menerima penghasilan. Walaupun demikian, tidak terjadi peningkatan pada penghasilan keseluruhan penduduk, sebagian besar penduduk yang bekerja hanya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak benar-benar meningkatkan taraf hidupnya, ataupun benar-benar mengeluarkan penduduk yang telah bekerja keluar dari jurang kemiskinan. Penduduk yang telah bekerja masih berada pada garis kemiskinan, penurunan persentasi



kemiskinan diakibatkan oleh faktor lain seperti peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, dan jika terjadi perubahan atau hilangnya faktor tersebut maka penduduk akan kembali pada jurang kemiskinan.

Penelitian ini berbedapada hasil uji signifikan namun faktor diluar kesempatan kerja seperti pendidikan dan kesehatan menunjang penelitian ini. Putra & Arka (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan (nyata) kesempatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh mengindikasikan bahwa peningkatan kesempatan kerja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mereka dapat keluar dari jurang kemiskinan. Demikian pula halnya dengan adanya pengaruh signifikan (nyata) pendidikan dan derajat kesehatan terhadap kemiskinan. Meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dapat membuat mereka bekerja secara lebih baik, dan pada akhirnya mereka dapat keluar dari juran kemiskinan. Hal ini lah yang menyebabkan pendidikan dan derajat kesehatan berdampak negative pada kemiskinan di Provinsi Aceh.

3.3.3 Pengaruh Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Persamaan pendapatan di antara rumah tangga biasanya diukur dengan distribusi pendapatan yang terkait dengan ukuran atau tingkat pendapatan per rumah tangga (atau anggota rumah tangga). Distribusi ini menjelaskan kelas ukuran pendapatan yang biasa disebut "ukuran distribusi pendapatan". Distribusi pendapatan dalam ilmu ekonomi dianalisis dalam terminology pembagian pendapatan dari faktor produksi. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang adalan memenuhi kebutuhan dasar atau standar hidup (sandang, papan dan pangan) karena pendapatan yang rendah. Perbedaan diantara kedua variabel seperti yang dikemukakan diatas yakni distribusi pendapatan melihat tingkat pembagian pendapatan yang diterima dari faktor produksi sementara kemiskinan melihat pembagian pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.

Tidak berpengaruhnya distribusi pendapatan terhadap kemiskinan mengindikasikan bahwa jumlah pendapatan setiap rumah tangga dari faktor produksi tidak mengalami peningkatan yang besar, artinya tidak banyak rumah tangga yang kaya, dan selisih pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk tidak memiliki perbedaan yang besar. Hal ini dibuktikan dengan nilai rasio gini yang masih berada pada kategori rendah atau $< 0,4$. Namun disisi lain kemiskinan justru mengalami penurunan, kemiskinan yang terjadi tidak berasal dari dimensi pendapatan dalam variabel distribusi pendapatan, kemiskinan yang terjadi diduga kemiskinan multidimensional seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga jika aspek non ekonomi ini diperbaiki maka kemiskinan akan mengalami penurunan.

Penelitian ini sejalan dengan World Bank(2013) Kebijakan World Bank Group (WBG) untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bersama tidak hanya meningkatkan dimensi moneter dari kesejahteraan, tetapi juga dimensi non moneter, yang meliputi antara lain: pendidikan, kesehatan, nutrisi dan akses terhadap infrastruktur esensial, pemberdayaan dan mendorong partisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan atau jika ketimpangan pendapatan naik maka kemiskinan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan ketidakmerataan dan kemiskinan, distribusi pendapatan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa temuan antara lain bahwa angka kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro adalah sekitar 15 persen (kriteria BPS), dan lebih dari 40 persen (kriteria ADB dan Bank Dunia). Lebih lanjut, indeks FGT menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan cukup rendah, maknanya untuk mengentaskan kemiskinan rumah tangga miskin diperlukan sumberdaya dan sumberdana yang tidak begitu besar. Sementara itu terjadi ketimpangan distribusi pendapatan dalam skala sedang, sehingga meskipun ada beberapa rumah tangga miskin namun mereka tidak terlalu jauh gap/jaraknya dengan rumah tangga tidak miskin lainnya.

3.4 Pengaruh Tidak Langsung Antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Melalui Distribusi Pendapatan

Nilai koefisien pengaruh tidak langsung lebih besar dari pada nilai koefisien pengaruh langsung antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, menyimpulkan bahwa pengaruh yang sebenarnya ialah pengaruh tidak langsung. Walaupun demikian, pengaruh tidak langsung antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui distribusi pendapatan tidak bermakna hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan dari pengaruh tidak langsung antara kedua variabel tersebut yang dihasilkan oleh sobel test $> 0,05$. Efek pertumbuhan ekonomi akan selalu negatif yaitu mengurangi kemiskinan sedangkan efek ketimpangan bisa positif ataupun negatif, jika negatif maka pertumbuhan juga menyebabkan distribusi pendapatan berubah dan menguntungkan kelompok yang tidak miskin (R. F. I. dan L. F. Putra, 2020)

Simbol dari Nilai koefisien yang dihasilkan oleh penelitian ini sejalan dengan penelitian Hajiji diatas. Namun penelitian ini berbeda, dimana penelitian diatas menggambarkan pengaruh yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan berdampak pada kemiskinan, yang mana pertumbuhan tersebut berpengaruh atau menguntungkan kelompok yang tidak miskin. Sementara penelitian ini tidak menghasilkan pengaruh atau tidak bermakna antara pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan terhadap kemiskinan. Tidak terjadinya pengaruh tidak langsung ini disebabkan variabel perantara yakni variabel distribusi pendapatan maupun variabel independen itu sendiri yakni variabel pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak terhadap kemiskinan walaupun secara tidak langsung melalui distribusi pendapatan. Hilangnya pengaruh tidak langsung antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, didugabawa kemiskinan yang terjadi di Provinsi Maluku tidak terjadi karena faktor pendapatan yang menjadi indikator yang diteliti dalam penelitian ini baik dari



dimensi pertumbuhan ekonomi yakni pendapatan daerah yang dihitung dengan PDRB, maupun pendapatan dari dimensi distribusi pendapatan yang dilihat dari tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi diantara penduduk. Kemiskinan yang terjadi diakibatkan oleh faktor lain seperti kesehatan dan pendidikan.

Menurut Todaro & Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik (HS Vera, dkk: 2013) berikut: (1) Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat. (2) Pendapatan perkapita negara-negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi. (3) Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata. (4) Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut. (5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di Negara. (6) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai. Kemiskinan multidimensional antara provinsi di Indonesia, mendapat kesimpulan salah satunya yaitu prioritas bantuan kesehatan dibutuhkan di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

3.5 Pengaruh Tidak Langsung Antara Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan Melalui Distribusi Pendapatan

Nilai koefisien pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pada nilai koefisien pengaruh langsung antara kesempatan kerja terhadap kemiskinan, menyimpulkan bahwa pengaruh yang sebenarnya ialah pengaruh langsung dan bukan pengaruh tidak langsung. Nilai signifikan yang $> 0,05$ sehingga Pengaruh tidak langsung antara kesempatan kerja terhadap kemiskinan melalui distribusi pendapatan tidak bermakna atau tidak signifikan. Jika melihat pada pembahasan sebelumnya tentang pengaruh langsung antara variabel kesempatan kerja terhadap kemiskinan dan pengaruh distribusi pendapatan terhadap kemiskinan, dapat dilihat bahwa variabel kesempatan kerja bermakna terhadap variabel distribusi pendapatan namun pengaruh variabel distribusi pendapatan tidak bermakna terhadap variabel kemiskinan.

Hilangnya pengaruh tidak langsung antara variabel kesempatan kerja terhadap variabel kemiskinan disebabkan oleh variabel perantara yakni variabel distribusi pendapatan. dalam penelitian ini variabel distribusi pendapatan lebih melihat pada ketimpangan yang terjadi diantara penduduk dari sisi pendapatan. Kesempatan kerja memberikan peluang peningkatan pendapatan pada penduduk, namun kemiskinan yang terjadi bukan hanya karena penduduk tidak mendapatkan pendapatan dengan menduduki kesempatan kerja yang tersedia melainkan karena kesenjangan dalam mengakses fasilitas untuk pengembangan diri terutama fasilitas yang bersifat publik untuk itu masyarakat perlu dibantu dalam mengakses fasilitas-fasilitas tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pasaman juga menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari diselenggarakannya program tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. mendapatkan hasil program SLRT terbukti efektif dalam mempercepat capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasman yang secara kelembagaan dari tingkat kabupaten/kota (Sekertariat SLRT) sampai dengan tingkat desa/kelurahan (Puskesmas). Hal ini untuk memudahkan warga miskin dan rentan di Kabupaten Pasaman mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk dihubungkan dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. SLRT di Kabupaten Pasaman tetap akan berlanjut meskipun anggaran dari Kementerian Sosial berhenti setelah tiga tahun. Namun demikian diharapkan pembinaan kepada daerah tetap dilanjutkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa, pengaruh model satu jalur yakni tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan dan terdapat pengaruh antara kesempatan kerja terhadap distribusi pendapatan. Pengaruh model dua jalur yakni tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, terdapat pengaruh antara kesempatan kerja terhadap kemiskinan, tidak terdapat pengaruh antara distribusi pendapatan terhadap kemiskinan, tidak terdapat pengaruh tidak langsung antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui distribusi pendapatan, dan tidak terdapat pengaruh tidak langsung antara kesempatan kerja terhadap kemiskinan melalui distribusi pendapatan. Tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui distribusi pendapatan terhadap kemiskinan membuktikan bahwa di Maluku kemiskinan mengindikasikan bahwa kemiskinan di Maluku lebih bersifat kemiskinan relative. Kemiskinan yang tercipta bukan diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang mempengaruhi pendapatan dan akibatnya tercipta kemiskinan, melainkan lebih diakibatkan oleh keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas publik yang akibat kondisi Maluku yang lebih didominasi oleh laut



REFERENCES

- Adriwina, S. (2019). Hubungan Negatif Antara Tingkat Inflasi Dengan Tingkat Kemiskinan Di Wilayah Perdesaan Provinsi Lampung. *STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, 19(1), 63–69. <https://doi.org/10.29313/jstat.v19i1.4587>
- Afandi1, A., & *, Dwi Wahyuni2, J. S. (2017). Policies to Eliminate Poverty Rate in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 435–441.
- Damanik, A. M. Z. R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25.
- Deyshappriya, N. P. R. (2021). Poverty Definition in Sri Lanka: Beyond Traditional Binary Classification. *South Asia Research*, 41(2), 279–296. <https://doi.org/10.1177/02627280211005042>
- Djirimu, M. A. (2021). Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia di ASEAN Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 4(3), 195–215. <https://doi.org/10.31685/kek.v4i3.665>
- Hendri Dony Hahury, Fredy H Louhanapessy, A. R. (2022). The Poor's Coping Strategies in Overcoming Water Scarcity in Small Island, Eastern Seram Regency, Maluku. *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1), 44–57. <https://doi.org/doi.org/10.22500/10202238241>
- Hill, H. (2021). What's happened to poverty and inequality in indonesia over half a century? *Asian Development Review*, 38(1), 68–97. https://doi.org/10.1162/adev_a_00158
- Hjazeen, H., Seraj, M., & Ozdeser, H. (2021). The nexus between the economic growth and unemployment in Jordan. *Future Business Journal*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s43093-021-00088-3>
- Mansi, E., Hysa, E., Panait, M., & Voica, M. C. (2020). Poverty-A challenge for economic development? Evidences from Western Balkan countries and the European union. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18), 1–24. <https://doi.org/10.3390/SU12187754>
- Mauliadiani, R. S., Siahaan, E., & Harahap, R. H. (2019). The Influence of Job Description and Leadership on the Employees' Work Effectiveness at the Sanitation and Landscaping Agency of Medan with Supervision as Moderating Variable. *International Journal of Research & Review (Www.Ijrrjournal.Com) Vol*, 6(8), 478–493.
- Mustamin, S. W. (2013). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano*, 466.
- Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *EP Unud*, 7(3), 416–444.
- Putra, R. F. I. dan L. F. (2020). Segitiga kemiskinan-Pertumbuhan-Ketimpangan (PGI Triangle): Financial Development, and Inequality in Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28, 77–90.
- Silalahi, E. (2013). Eksploitasi Kerja Dan Resistensi Karyawan Pt. Seruni Indah Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 1(3), 1–6.
- Sinding, S. W. (2009). Population, poverty and economic development. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1532), 3023–3030. <https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0145>
- Suhartono, S. (2011). Struktur Ekonomi, Kesempatan Kerja Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 86–101. <https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.94.2011>
- Sun, H., Li, X., Li, W., & Feng, J. (2022). Differences and Influencing Factors of Relative Poverty of Urban and Rural Residents in China Based on the Survey of 31 Provinces and Cities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(15), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph19159015>
- Tridiana, C., & Widyawati, D. (2019). Dampak Upah Minimum terhadap Probabilitas Keluar dari Sektor Formal. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 0(0), 119–139. <https://doi.org/10.21002/jepi.v0i0.1082>
- Wardhana, I. W. (2016). Political Economic Determinants of Growth Acceleration: A Korea-Indonesia Comparative Study. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(1), 77–95. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i1.182>